

**IMPLEMENTASI KEBIJAKAN SIMURP KOMPONEN-B UPAYA
PENINGKATAN EFISIENSI IRIGASI MELALUI PENDEKATAN
MODERNISASI BERBASIS PARTISIPATIF
DI KABUPATEN SUBANG (STUDI KECAMATAN BINONG)**

Febriyanti Astuti¹, Mardiah Afrillah², Dina Yuli Nurida³, Agus Samsi Munawar⁴,
Tepi Peirisal⁵

Program Studi Magister Ilmu Administrasi Universitas Subang

Febriyantiastuti8@gmail.com¹ ; Mardiah.afrillah2015@gmail.com² ;
Dinayuli85@gmail.com³ ; Aghissyams313@gmail.com⁴; teypei@gmail.com⁵

ABSTRAK

Masalah utama dalam penelitian ini yaitu pertama, sumber daya manusia yang masih terbatas dalam sistem irigasi pengelolaan kelompok P3A. Kedua, dukungan Anggaran Tahunan untuk kelompok P3A yang masih terbatas yang terakhir 14 kelompok P3A belum ada yang berbadan hukum di Kabupaten Subang. Teori yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan teori yang dikemukakan oleh Edward III yang terdiri dari *communication, resources, dispositions dan bureaucratic structure*. Metode penelitian yang digunakan adalah metode deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan cara studi pustaka, studi lapangan yang terdiri dari observasi dan wawancara serta dokumentasi. Informan dalam penelitian ini merupakan informan kunci yang berkaitan dengan pelaksanaan SIMURP Komponen-B.

Hasil penelitian ditinjau dari komponen communication masih terdapat *miss communication*. Juga belum adanya tindak lanjut dari sosialisasi berupa monitoring dan evaluasi. Ditinjau dari komponen resource, masih memiliki keterbatasan sumber daya, khususnya sarana prasarana pendukung pelaksanaan kebijakan. Ditinjau dari komponen dispositions, belum adanya komitmen yang kuat terkait SIMURP Komponen-B. Ditinjau dari komponen Bureaucratic structure, belum terlaksana semuanya SOP pelaksanaan SIMURP Komponen-B serta masih adanya rangkap jabatan.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa proses komunikasi yang belum berjalan efektif menyebabkan adanya informasi yang bias diterima oleh masyarakat. Terkait dengan sumber daya, sumber daya manusia belum berbanding dengan luasnya areal yang harus digarap. Sementara untuk penyediaan anggaran terlalu minim. Untuk disposisi, komitmen yang kuat belum dapat ditunjukkan oleh para implementor dari kebijakan tersebut. Hal ini terlihat dari adanya komunikasi yang kurang berjalan dari pemberi informasi kepada para penerima informasi. Dari sisi ketersediaan SOP, bagian Komponen-B pada daerah kabupaten Subang sudah ada dan mencukupi. Hanya saja masih terdapat fragmentasi, dimana bagian SIMURP Komponen-B daerah Kabupaten Subang sebagian koordinator belum sinkron dengan perangkat daerah lainnya terutama Dinas PUPR, BBWS, setiap dalam acara kegiatan sosialisasi kadang mangkir tidak hadir, dari situ sehingga terjadi *miss communication* penyampaian dari satu pihak.

Kata Kunci: Implementasi Kebijakan, Startegic Irrigation Modernization And Urgent Rehabilitation Project.

ABSTRACT

The main problems in this study are, first, the limited human resources in the irrigation system for the P3A group management. Second, the annual budget support for WUA groups is still limited, of which the last 14 P3A groups have not yet had a legal entity in Subang Regency

The theory used in this research uses the theory put forward by Edward III which consists of communication, resources, dispositions and bureaucratic structure. The research method used is descriptive method with qualitative approach. Data collection techniques were carried out by means of literature studies, field studies consisting of observations and interviews and documentation. Informants in this study are key informants related to the implementation of SIMURP Component-B..

The results of the study indicate that the communication process that has not been running effectively causes information that can be accepted by the community. In terms of resources, human resources have not been compared with the size of the area to be worked on. Meanwhile for the provision of the budget is too minimal. In terms of disposition, the implementers of the policy have not yet shown a strong commitment. This can be seen from the lack of communication from the giver of information to the recipients of information. In terms of SOP availability, the Component-B section in the Subang district already exists and is sufficient. It's just that there is still fragmentation, where the SIMURP Component-B area of Subang Regency, some of the coordinators are not in sync with other regional apparatus, especially the PUPR Service, BBWS, every time the socialization event is absent sometimes, they are absent, from there so there is a miss communication delivery from one party

Keywords: Policy Implementation, Strategic Irrigation Modernization And Urgent Rehabilitation Project.

1.1 Latar Belakang Penelitian

Modernisasi Irigasi Strategis dan Program Rehabilitasi Mendesak (SIMURP) menanggapi kebutuhan sebagaimana dirumuskan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Pemerintah (RPJM) dengan menggunakan kerangka lima pilar untuk mempromosikan rehabilitasi dan persiapan modernisasi sistem irigasi nasional yang ada, disebut sebagai Revitalisasi Irigasi. Proyek yang diusulkan akan berfokus memungkinkan sekitar hektar sistem irigasi nasional untuk direhabilitasi dan pada tahap yang

lebih atau lebih dimodenisasi melalui program revitalisasi, sedangkan sistem Jatiluhur (hektar) akan menjadi obyek strategis modernisasi (komponen B).

Kegiatan rehabilitasi dan modenisasi ini akan dikembangkan dalam hal penyampaian layanan yang lebih baik dan menangani sistem penilaian, informasi manajemen dan sistem pendukung keputusan, penguatan kelembagaan, pengembangan sumber daya manusia dan studi dan desain untuk rehabilitasi dan modernisasi infrastruktur irigasi, saluran dan pengelolaan banjir. Semua kegiatan ini

akan mengikuti Prinsip dan Praktik Pengelolaan Irigasi Partisipatif (PPSIP).

Tujuannya adalah untuk meningkatkan kemampuan pelayanan sistem irigasi premium melalui modernisasi manajemen dan infrastruktur yang ada dengan memperkenalkan teknologi yang lebih tinggi untuk mendukung program ketahanan pangan nasional. Komponen B akan berfokus terutama pada DI Irigasi Jatiluhur (ha) dan sesuai dengan Pilar 1 Modernisasi Pemerintah tentang Ketersediaan Air dan Pilar 2 tentang Rehabilitasi dan Peningkatan Infrastruktur.

SIMURP merupakan salah satu kegiatan yang dikembangkan oleh pemerintah dalam menangani masalah infrastruktur, kelembagaan, sistem informasi dan manajemen yang diperlukan untuk meningkatkan efisiensi irigasi melalui pendekatan modernisasi berbasis partisipatif.

Di wilayah Kecamatan Binong sudah terbentuk sembilan kelompok P3A tetapi sudah tidak aktif lagi, maka dari itu akan diadakannya revitalisasi/pembaharuan pengurus dan akan membentuk lima kelompok P3A yang baru karna sesuai aturan yang sekarang Persatu kelompok P3A memegang 100 Ha .

Kelompok yang sudah ada sembilan P3A dan lima P3A yang akan dibentuk akan dibuatkan akta notaris (legal) dalam program Simurp Komponen-B tujuannya agar kedepannya mempermudah bagi administrasi kelompok itu sendiri karna kelompok P3A ini di bentuk untuk kemandirian dari masyarakat petani khususnya di wilayah kecamatan Binong.

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Peraturan Presiden No.37 Tahun 2010

tentang Bendungan .Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan No.27 / PRT / M / 2015 tentang Bendungan. Strategic Irrigation Modernization and Urgent Rehabilitation Project (SIMURP) merupakan proyek yang bersumber dari Loan Agreement antar Pemerintah Indonesia dengan World Bank (WB) dan Asian Infrastructure Investment Bank (AIIB) yang pengelolaannya ada pada lintas empat Kementerian dan Lembaga yaitu Bappenas, Kementerian PUPR, Kementerian Dalam Negeri dan Kementerian Pertanian. Tujuan Proyek SIMURP adalah optimalisasi dan modernisasi layanan sistem irigasi yang efektif, efisien dan berkelanjutan dengan target luas area seluas 276.000 hektar yang diharapkan dapat meningkatkan Intensitas Pertanaman (IP) Padi dari target 180% menjadi 200%.

Rehabilitasi Mendesak dan Perbaikan Infrastruktur bertujuan untuk mendukung rehabilitasi dan modernisasi sekitar hektar wilayah komando irigasi untuk mengatasi kerusakan yang terus terjadi pada DI irigasi dan disesuaikan dengan Pilar 1 untuk Ketersediaan Air dan Pilar 2 pada Infrastruktur Irigasi. Pemerintah telah mendefinisikan daftar awal dari 41 DI irigasi, dengan total hektar, tersebar di 11 propinsi dan 12 wilayah balai atau sungai. Ini termasuk lokasi di Jawa, Sumatera, Kalimantan, Sulawesi dan NTB. Ukuran rata-rata DI yang diusulkan kira-kira hektar, mulai dari yang terbesar seluas hektar sampai yang terkecil yaitu hektar. Dua dari DI yang dipilih adalah sistem padi di dataran rendah pasang surut. Kegiatan yang akan dibiayai di bawah komponen ini meliputi penilaian dan optimalisasi sumber daya air, survei, investigasi dan desain dan rehabilitasi dan peningkatan saluran irigasi dan saluran, struktur pengendalian aliran dan perangkat pengukuran, fasilitas penyimpanan dan infrastruktur pendukung serta dukungan

terhadap pengembangan dan peningkatan sistem tersier.

Semua kegiatan ini akan menerapkan Prinsip Pengelolaan Irigasi Partisipatif (PPSIP). Kriteria tersebut telah dibahas untuk membantu dalam memprioritaskan investasi di antara DI yang diusulkan untuk membantu dalam memprioritaskan investasi di antara DI yang diusulkan untuk membantu Direktorat Jenderal Sumber Daya Air (DGWR) menyiapkan investasi prioritas tahun pertama dan panduan pelaksanaan melalui jadwal yang obyektif. Komponen B: Modernisasi Infrastruktur Strategis Komponen B: Modernisasi Infrastruktur Strategis juga sejalan Irigasi Pemerintah Pilar 2 Infrastruktur namun berfokus pada DI irigasi yang siap untuk dimulainya modernisasi infrastruktur irigasi mereka. Awalnya ini adalah DI Irigasi Jatiluhur yang dilayani oleh Sungai Citarum di Jawa Barat, juga karena di bawah pinjaman WISMP2, persiapan untuk awal modernisasi irigasi telah disiapkan dengan paket TA khusus.

DI Irigasi Jatiluhur merupakan pengembangan premi negara dan kandidat paling kritis untuk modernisasi mengingat kompleksitas isu dan pengaturan kelembagaan yang berkaitan dengan tantangan transisi di Indonesia. Tujuan dari komponen B ini adalah untuk meningkatkan kemudahan pelayanan sistem irigasi premium melalui revitalisasi dan modernisasi pengelolaan dan infrastruktur yang ada dengan memperkenalkan teknologi yang lebih tinggi untuk mendukung ketahanan pangan nasional. Namun pada pelaksanaannya ada beberapa hal yang masih menjadi masalah yaitu penyediaan sumber daya manusia yang masih kurang. Sumber Daya Manusia (SDM) pengelola SIMURP Komponen-B Kelompok P3A masih kurang, dari 38 Kelompok P3A di wilayah Kecamatan

Binong terdapat 66,33% kelompok P3A yang belum dibentuk/revitalisasi dan berbadan Hukum. Masalah yang kedua yaitu swasta atau pihak penyediaan SIMURP Komponen-B di kabupaten Subang wilayah Kecamatan Binong, masih banyak yang belum di revitalisasi/pembentukan dan berAkta Notaris (Legal), berdasarkan data dari Kementerian Pertanian dan Kementerian Dalam Negeri (subang dalam angka 2020) terdapat 11 Kelompok P3A yang berbadan hukum, yang terdaftar di Kementerian Dalam Negeri baru sekitar 10,86%.

1.2 Rumusan Masalah

Dengan demikian rumusan masalah dari penelitian ini adalah Bagaimana Implementasi Kebijakan Strategic Irrigation Modernization And Urgent Rehabilitation Project (SIMURP) Komponen-B Upaya Peningkatan Efisiensi Irigasi Melalui Pendekatan Modernisasi Berbasis Partisipatif Di Daerah Kabupaten Subang?

2.1 Kajian Pustaka

2.1.1 Kebijakan Publik

Kebijakan publik merupakan kewenangan pemerintah menjalankan tugas dan fungsinya dalam hubungannya dengan masyarakat dan dunia usaha. Pada dasarnya kebijakan pemerintah dalam menata kehidupan masyarakat di berbagai aspek merupakan kebijakan yang berorientasi pada kepentingan publik (masyarakat). Sementara kebijakan merupakan prinsip atau tata cara yang dipilih dalam proses pengambilan keputusan. Kondisi ini diawali dengan perumusan masalah yang sudah diidentifikasi dengan tepat kemudian implementasi kebijakan tersebut bertujuan untuk memecahkan masalah yang sedang terjadi dalam kehidupan masyarakat. (Hirawan, 2019; Peirisal, 2015)(Bastaman, 2020)

sikap pelaksana) 4) *Bureaucratic Structure* (Struktur birokrasi).

2.1.2 Implementasi kebijakan Publik

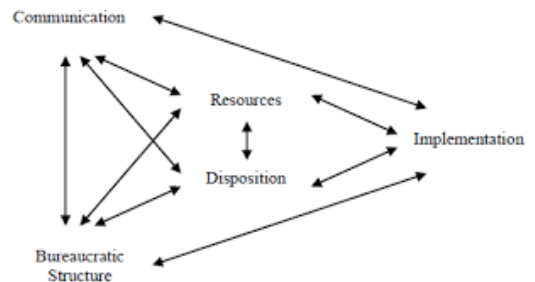
Implementasi kebijakan merupakan tahapan lanjutan dari satu bentuk formulasi kebijakan. Pada tataran formulasi, kebijakan disusun berdasarkan strategi dan tujuan-tujuan yang hendak dicapai atas kebijakan tersebut. Sementara pelaksanaannya, bagian dari interaksi antara tujuan dan tindakan yang mampu dan dapat dilaksanakan. (Hirawan et al., 2018; Peirisal, 2015)

Hal tersebut sesuai dengan konsep dari Winaro (2014: 29) bahwa implementasi kebijakan merupakan rangkaian proses kebijakan publik. Proses kebijakan suatu rangkaian tahap yang salingbergantung yang diatur menurut urutan waktu: Penyusunan agenda, formulasi kebijakan, adopsi kebijakan, dan penilaian kebijakan

Implementasi merupakan salah satu tahap dalam proses kebijakan publik biasanya implementasi dilaksanakan setelah sebuah kebijakan dirumuskan dengan tujuan yang jelas. Implimentasi kebijakan dari sudut pandang teori siklikal (cyclical theory) maka implementasi itu akan diperlukan sebagai suatu tahapan penting yang berlangsung dari proses kebijakan, terutama setelah wacana legal formal, biasanya berupa undang-undang, peraturan, ketetapan, atau bentuk-bentuk produk lainnya, dianggap sudah usai.

Model implementasi kebijakan yang digunakan dalam penelitian ini yaitu model Edward III dalam Subarson (2010: 90) bahwa implementasi kebijakan dipengaruhi oleh empat variabel, yakni: 1) *Communication* (Komunikasi) 2) *Resources* (Sumber daya) 3) *Dispositions* (disposisi atau

Gambar 1
Dampak Langsung dan Tidak Langsung pada Implementasi



Sumber: George C. Edward III dalam Subarsono (2010:90)

3.1 Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif. Pendekatan kualitatif dipandang memiliki relevansi dan cocok karena bertujuan menggali dan memahami apa yang tersembunyi dibalik fenomena Implementasi Kebijakan Stategic Irrigation Modernization And Urgent Rehabilitation Project (SIMURP) Komponen-B Upaya Peningkatan Efisiensi Irigasi Melalui Pendekatan Modernisasi Berbasis Partisipatif Di Daerah Kabupaten Subang.

Metode kualitatif dipilih karena melalui metode ini akan diperoleh kejelasan makna dari setiap pola kelakuan yang ditunjukkan oleh subyek penelitian yang boleh jadi kurang begitu terungkap ke permukaan. Seorang peneliti yang menggunakan metode kualitatif harus betul-betul bersikap kritis, sensitif, dan mampu untuk berintegritas dengan kehidupan masyarakat yang ditelitinya.

Metode penelitian kualitatif digunakan untuk mendapatkan data yang mendalam, suatu data yang mengandung

makna. Makna adalah data yang sebenarnya, data yang pasti merupakan suatu nilai dibalik data yang tampak, oleh karena itu dalam penelitian kualitatif tidak menekankan pada generalisasi, tetapi lebih menekankan pada makna.

Sedangkan teknik yang digunakan adalah studi kasus, yaitu suatu cara pengumpulan data dari beberapa informan yang terkait langsung pada penelitian ini. Studi kasus adalah penelitian yang menggali kesatuan fenomena tunggal yang dibatasi oleh waktu dan aktivitas, program, kejadian, proses, insitusi, atau kelompok sosial. Peneliti studi kasus adalah penelitian untuk mendalami suatu proses.

4.1 Hasil Penelitian

Implementasi kebijakan adalah bagian dari rangkaian proses kebijakan publik. Proses kebijakan adalah suatu rangkaian tahap yang saling bergantung yang diatur menurut urutan waktu: penyusunan agenda, formulasi kebijakan, adopsi kebijakan, dan penilaian kebijakan (Winarno, 2014:29).

Dalam penelitian ini, yaitu Implementasi Kebijakan Simurp Komponen-B Upaya Peningkatan Effisiensi Irigasi Melalui Pendekatan Modernisasi Berbasis Partisipatif Di Daerah Kabupaten Subang (Wilayah Kecamatan Binong), dimana pendekatan model implementasi kebijakan yang dijadikan acuan adalah model implementasi kebijakan menurut teori Edward III, yang mengemukakan bahwa faktor-faktor yang mempengaruhi implementasi kebijakan adalah faktor komunikasi, sumber daya, disposisi dan struktur birokrasi.

4.1.1 Komunikasi

Komunikasi memegang peranan yang sangat penting dalam kesuksesan

suatu kebijakan termasuk kebijakan Simurp Komponen-B Upaya Peningkatan Effisiensi Irigasi Melalui Pendekatan Modernisasi Berbasis Partisipatif Di Daerah Kabupaten Subang (Wilayah Kecamatan Binong)

komunikasi sangat menentukan keberhasilan pencapaian tujuan dari implementasi Kebijakan Simurp Komponen-B Upaya Peningkatan Effisiensi Irigasi Melalui Pendekatan Modernisasi Berbasis Partisipatif Di Daerah Kabupaten Subang (Wilayah Kecamatan Binong), Implementasi yang efektif terjadi apabila para pembuat keputusan sudah mengetahui apa yang akan mereka kerjakan. Pengetahuan atas apa yang akan mereka kerjakan dapat berjalan bila komunikasi berjalan dengan baik, sehingga implementasi program harus dikomunikasikan kepada pihak yang tepat. Selain itu, kebijakan yang dikomunikasikan pun harus tepat, akurat, dan konsisten.

Komunikasi internal dilakukan melalui media pertemuan mingguan. Sementara itu, untuk komunikasi atau sosialisasi terkait Kebijakan Simurp Komponen-B Upaya Peningkatan Effisiensi Irigasi Melalui Pendekatan Modernisasi Berbasis Partisipatif terhadap unsur swasta dan masyarakat sudah terlaksana secara maksimal, komunikasi tidak hanya menggunakan media internet. Masyarakat dan unsur swasta juga dapat mengakses informasi mengenai implementasi kebijakan program SIMURP Komponen-B secara elektronik melalui website yang sudah disediakan Kementerian Dalam Negeri

Sementara komunikasi yang dilakukan oleh pihak swasta menggunakan media on line atau internet. Walaupun komunikasi tersebut masih terdapat beberapa kendala yaitu adanya keterbatasan informasi yang diterima oleh masyarakat sehingga tingkat kejelasan atas informasi yang

diterima masih bias. Terjadinya *miss communication* merupakan bentuk dari tidak dilaksanakannya pesan secara utuh yang dapat diartikan bahwa pesan tersebut mengalami kegagalan.

Kemudian penilaian masyarakat terhadap program SIMURP Komponen-B, dimana masyarakat merupakan salahsatu penerima manfaat dari Program SIMURP Komponen-B, pada awalnya dapat dikatakan memiliki penilaian negatif, karena menurut jawaban hasil wawancara, Progam SIMURP Komponen-B ini terkesan terlambat, hal ini dapat dilihat dari banyaknya Saluran sekunder yang rusak dan kelompok P3A (Petani Pemakai Air) yang tidak aktif

Komunikasi kepada kepala perangkat daerah melalui briefing, memiliki keterbatasan karena dalam setiap *briefing* muncul beberapa isu yang terjadi, sehingga untuk isu Program SIMURP Komponen-B waktunya cukup terbatas. Begitupun terjadi terhadap kegiatan sosialisasi terhadap perangkat-perangkat daerah, dimana dalam hasil pengamatan terdapat beberapa perangkat daerah mengirimkan perwakilannya saja yang kadang- kadang tidak begitu memahami terkait Program SIMURP Komponen-B. Dalam komunikasi internal, terkadang tingkat kehadiran peserta juga menjadi masalah sehingga tujuan dari pertemuan tidak tercapai maksimal. Komunikasi atau sosialisasi melalui internet atau website memiliki kelebihan keterjangkauan informasi yang luas akan tetapi memiliki kelemahan karena lebih kearah komunikasi yang bersifat satu arah, dimana tidak ada ruang untuk mengklarifikasi atau mengkonfirmasi informasi yang ada.

4.1.2 Sumber daya

Sumber daya ini meliputi sumber daya manusia (SDM) dan sumber daya non manusia seperti keuangan (anggaran) serta sarana dan prasarana lainnya. Menurut Edward III, sumber daya (*resources*) memiliki posisi sangat penting dalam keberhasilan implementasi kebijakan. Selanjutnya Edward III mengemukakan, bahwa apabila para pelaksana mengalami kekurangan sumber daya yang diperlukan untuk menjalankan kebijakan, maka implementasi tersebut tidak akan menjadi efektif, walaupun perintah implementasi ditransmisikan dengan akurat, jelas, dan konsisten. Ketersediaan sumber daya sangat penting karena keterbatasan akan sumber-sumber yang tersedia, baik tenaga, biaya, dan waktu, serta perumusan kebijakan yang hanya berdasarkan salah satu dari sejumlah kecil sumber daya tersebut dan membiarkan masyarakat merespon dengan caranya sendiri-sendiri, maka kebijakan publik yang dibuat tidak memperoleh dampak sebagaimana yang diharapkan.

Kelompok P3A di Kecamatan Binong merupakan ujung tombak bagi masyarakat petani dalam kegiatan pengelolaan air di setiap saluran sekunder dan petak tersier. Keterbatasan personil kelompok P3A dan Kekurangan Kelompok P3A yang membuat terhambatnya sistem pengelolaan irigasi dalam ruang lingkup saluran sekunder dan petak tersier yang menyebabkan air kadang kala tidak mengalir dengan baik (Tersendat) atau malah air terbuang dengan percuma. Dengan kata lain, ketersediaan sumber daya manusia belum berbanding dengan areal yang harus digarap. Namun, hal ini belum mendapat perhatian yang serius dari pihak swasta dan pemerintah.

Untuk sumber daya anggaran pada kelompok P3A hasil dari iuran

anggota, masyarakat petani, bantuan, dan swadaya dari masyarakat petani. Anggaran tersebut untuk membayar para pengurus yang terdiri dari enam orang, untuk perawatan saluran, dan untuk uang kas kelompok. Dari hasil iuran anggota saja tidak cukup malah terkadang anggota/ masyarakat petani ada yang tidak membayar iuran .

4.1.3 Disposisi

Pelaksana kebijakan SIMURP Komponen-B memiliki nilai-nilai yang bisa jadi berbeda antara satu dengan yang lain. Perbedaan nilai ini menimbulkan perbedaan kebijakan atau penilaian terhadap kebijakan yang ada. Jika perbedaan nilai antara pembuat kebijakan dengan pelaksana kebijakan cukup besar dan cenderung berlawanan arah, maka pelaksana kebijakan akan berada pada tahap yang sulit. Keengganan, bahkan friksi, akan muncul menghambat pelaksanaan kebijakan. Umumnya para penyelenggara Program SIMURP Komponen-B menyikapi kebijakan SIMURP Komponen-B tampaknya cukup di apresiasi dengan baik.

Pada sisi lain, persaingan yang sehat merupakan prinsip dasar yang sangat penting dan pokok dari semua prinsip yang ada. Persaingan yang sehat dapat ditunjukkan dengan adanya kondisi yang bebas untuk ikut di dalam persaingan maupun bebas untuk meninggalkan persaingan tanpa ada batasan yang menghambat. Oleh karena itu SIMURP Komponen-B Daerah Kabupaten Subang wilayah Kecamatan Binong harus terbuka bagi masyarakat petani untuk pembentukn/revitalisasi kelompok P3A yang baru yang memenuhi persyaratan dan dilakukan melalui persaingan yang sehat, setara dan memenuhi syarat/kriteria tertentu berdasarkan ketentuan dan prosedur yang jelas dan transparan.

Ada beberapa prasyarat agar persaingan yang sehat dapat diberlakukan yakni selaku Koordinator/TPM harus dilaksanakan dengan transparan dan dapat diakses dengan mudah oleh seluruh calon pengurus kelompok P3A yang potensial, ada kondisi yang memungkinkan masing masing calon pengurus mampu memperkirakan dan mengevaluasi diri berkaitan dengan tingkat kompetitifnya serta peluang untuk memenangkan persaingan, perlu dihindarkan terjadinya konflik kepentingan.

Implementasi kebijakan program SIMURP Komponen-B yaitu dimana pada proses administrasi kelompok P3A masih kurang memanfaatkan teknologi seperti masih menggunakan manual seperti buku daftar hadir kunjungan dari penyuluhan atau kegiatan lainnya, buku iuran anggota yang masih menggunakan manual, dan tidak melalui website, dikarenakan keterbatasan ilmu memakai teknologi. Sisi lain, dari pihak penyedia mempunyai komitmen untuk mengikuti semua kebijakan program SIMURP untuk dapat mewujudkan cita-cita pemerintah.

4.1.4 Struktur Birokasi

Struktur birokrasi diartikan sebagai karakteristik-karakteristik, norma-norma dan pola hubungan yang terjadi berulang-ulang dalam badan-badan eksekutif yang memiliki hubungan baik potensial maupun nyata dengan apa yang mereka miliki dengan adanya implementasi terhadap suatu kebijakan. Komponen dari model ini terdiri dari ciri-ciri struktural formal dari organisasi-organisasi dan atribut-atribut yang tidak formal dari personil mereka. Di samping itu perhatian juga perlu ditujukan kepada ikatan-ikatan badan pelaksana dengan pemeran-pemeran dalam sistem implementasi kebijakan.

Prosedur operasi adalah tata cara rutin yang memungkinkan para pejabat publik untuk membuat berbagai keputusan dari pedoman kegiatan dan tatacara pengelolaan kebijakan SIMURP Komponen-B. Prosedur-prosedur ini dalam menanggulangi keadaan-keadaan umum digunakan dalam organisasi-organisasi publik dan swasta. Dengan menggunakan SOP para pelaksana dapat memanfaatkan waktu yang tersedia. Selain itu, SOP juga menyeragamkan tindakan-tindakan dari para pejabat dalam organisasi organisasi yang komplek dan tersebar luas, yang pada gilirannya dapat menimbulkan fleksibilitas yang besar dan kesamaan yang besar dalam menerapkan peraturan-peraturan. Kurangnya sumber daya yang diperlukan untuk implementasi dengan semestinya membantu dalam menjelaskan penggunaan SOP yang berulang-ulang.

Para pelaksana jarang mempunyai kemampuan untuk menyelidiki dengan seksama dan secara individual setiap keadaan yang mereka hadapi. Sebaliknya mereka mengandalkan pada prosedur-prosedur biasa yang menyederhanakan pembuatan dan menyesuaikan tanggung jawab program dengan sumber daya yang ada. Akan tetapi SOP kadang-kadang memunculkan dampak yang kurang realistis.

Tentunya setiap Program memiliki kelebihan dan kekurangan yang berbeda-beda, akan tetapi karena peruntukan pelayanan publik telah dibatasi sedemikian rupa, sehingga instansi pemerintah memaksakan pelaksanaan tersebut pada sektor yang sebenarnya kurang prioritas. Hal yang terpenting dalam SIMURP Komponen-B yaitu terciptanya pelayanan publik yang dapat memenuhi harapan masyarakat.

Pada saat ini masalah tersebut dalam perhatian yang cukup serius untuk

meningkatkan efektifitas dan efisiensi kerja. Dampak dari keterbatasan sumber daya tersebut adalah mempengaruhi kecenderungan pelaksana dalam implementasi kebijakan SIMURP Komponen-B di Daerah Kabupaten Subang wilayah kecamatan Binong. Kecenderungannya antara lain, belum terbentuknya pola evaluasi, pelaporan dan pengawasan yang dapat menjamin kontinuitas, transparansi dan akuntabilitas kelompok sebelumnya. Secara internal fragmentasi di dalam struktur Bagian Tim Leader SIMURP Komponen-B di Daerah Kabupaten Subang sebagai penyelenggara program dapat diminimalisir, akan tetapi fragmentasi dengan stakeholder implementasi terjadi akibat sosialisasi program yang tidak merata ke pada masyarakat dan calon-calonPengurus Kelompok P3A

5.1 Kesimpulan dan saran

Proses komunikasi yang belum berjalan efektif menyebabkan adanya informasi yang bias diterima oleh masyarakat. Selain itu, komunikasi yang terjalin antara penyedia dan masyarakat belum terakomondir dalam program kegiatan yang ada pada SIMURP daerah Kabupaten Subang, dimana hanya dilaksanakan melalui media internet/website, meskipun sosialisasi sudah dilakukan tatap muka sebagian informan yang penting malah tidak ikut serta dalam kegiatan, yang sudah tentu kurang efektif karena komunikasi tersebut hanya berjalan satu arah.

Terkait dengan sumber daya, sumber daya manusia belum berbanding dengan luas nya areal yang harus digarap. Sementara untuk penyediaan anggaran terlalu minim. Hal ini dikarenakan anggaran diprioritaskan untuk membayar para pengurus kelompok P3A yang lebih penting. Dari

sisi sarana prasarana pendukung, masih terdapat kekurangan, yaitu banyak nya saluran yang tidak terurus, banyaknya saluran yang rusak.

Untuk disposisi, komitmen yang kuat belum dapat ditunjukkan oleh para implementor dari kebijakan tersebut. Hal ini terlihat dari adanya komunikasi yang kurang berjalan dari pemberi informasi kepada para penerima informasi. Dari sisi ketersediaan SOP, bagian Komponen-B pada daerah kabupaten Subang sudah ada dan mencukupi. Hanya saja masih terdapat fragmentasi, dimana bagian SIMURP Komponen-B daerah Kabupaten Subang sebagian koordinator belum sinkron dengan dengan perangkat daerah lainnya terutama Dinas PUPR, BBWS, setiap dalam acara kegiatan sosialisasi kadang mangkir tidak hadir, dari situ sehingga terjadi *miss communication* penyampaian dari satu pihak.

Untuk itu perlu dibenahi pola komunikasi kebijakan internal maupun di lingkup Komponen-B, Perangkat daerah lain, serta masyarakat. Selain komunikasi dalam hal ini sosialisasi perlu ditingkatkan lagi untuk melaksanakan kegiatan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan SIMURP Komponen-B secara berskala. Sementara untuk kebijakan, SOP bagi pelaku SIMURP Komponen-B yaitu KTPM/TPM terkait Komponen-B. Untuk menghindari rangkap jabatan agar KTPM/TPM mulai memfasilitasi untuk pemenuhan fungsional pengelola SIMURP Komponen-B, sehingga diharapkan SDM pengelola Tenaga Pendamping Masyarakat (TPM) atau Kelompok P3A lebih fokus dalam implementasi kebijakan SIMURP Komponen-B tanpa dibebani oleh tugas yang lain.

DAFTAR PUSTAKA

- Abidin, Said Zainal. 2012. *Kebijakan Publik*. Jakarta: Penerbit Salemba Humanika.
- Agustino, Leo. 2006. *Dasar-Dasar Kebijakan Publik*. Bandung: CV. Alfabeta.
- Subarsono, AG. 2010. *Analisis Kebijakan Publik (Konsep Teori dan Aplikasi)*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Sudarsono. 2003. *Beberapa Pendekatan Dalam Penelitian Kualitatif*, Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
- Sugiono. 2010. *Memahami Penelitian Kualitatif*. Bandung: Alfabeta
- Winarno, Budi. 2014. *Teori dan Proses Kebijakan Publik*. Yogyakarta: Media Press.
- Dokumen-Dokumen
- Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan lingkungan hidup.
- Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah Umum.
- Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2012 tentang Penanganan Konflik Sosial.
- Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya.
- Peraturan Pemerintah (PP) No. 6 Tahun 1995 tentang Perlindungan Tanaman.
- Peraturan Pemerintah (PP) No. 37 Tahun 2010 tentang Bendungan.
- Peraturan Pemerintah (PP) No. 27 Tahun 2012 tentang Izin Lingkungan Hidup.

Peraturan Presiden No. 71 Tahun 2012
tentang Pembebasan Lahan
Untuk Kepentingan Umum.

Peraturan Presiden Nomor 40 Tahun
2014 tentang Perubahan Perpes
No. 71 Tahun 2012 tentang
Pembebasan Lahan Untuk
Kepentingan Umum.

Jurnal, Skripsi, Tesis Dan Disertasi

Bastaman, K. (2020). Implementasi
Kebijakan Pajak Reklame di Badan
Pendapatan Daerah (BAPENDA)
Kabupaten Subang. *The World of
Public Administration Journal*.
[https://doi.org/10.37950/wpaj.v1i1.
736](https://doi.org/10.37950/wpaj.v1i1.736)

Hirawan, Z. (2019). PARADOKS
KEBIJAKAN PEMBANGUNAN
PERUMAHAN DI KABUPATEN
SUBANG. *Jurnal Administrasi
Publik*, 10.
[https://jurnal.untirta.ac.id/index.ph
p/jap/article/view/6789/4808](https://jurnal.untirta.ac.id/index.php/jap/article/view/6789/4808)

Hirawan, Z., Muhtar, E. A., Sumaryana,
A., & Adiwisastra, J. (2018).
Implementasi Kebijakan
Pembangunan Perumahan di
Kabupaten Subang. *Jurnal
Administrasi Publik*, 9(2).

Peirisal, T. (2015). IMPLEMENTASI
KEBIJAKAN PENATAAN
RUANG PERUNTUKAN
INDUSTRI DI KELURAHAN
KARANGANYAR
KECAMATAN SUBANG. *Jurnal
Ilmu Administrasi*, 8, 1–18.
[http://ejournal.unsub.ac.id/index.ph
p/FIA/article/view/474](http://ejournal.unsub.ac.id/index.php/FIA/article/view/474)